

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PD BKK GONDANGREJO KARANGANYAR

Erlina Sih Rahayu ¹⁾
Mulyono ²⁾

^{1, 2)} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

e-mail: ¹⁾ erlina@gmail.com

²⁾ mulyono2511@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine effectiveness of the implementation of internal control system in provision credit in PD BKK Gondangrejo Karanganyar. The research method using qualitative research with descriptive analysis technique. Methods of data collection using questionnaires, documentation, observation, and interviews. Results of this research showed that credit provision system adopted by PD BKK Gondangrejo Karanganyar has been implemented in accordance with the provisions on the procedure of crediting starting from credit applications, investigation and credit analysis, approval of loan application, disbursement, until payment. Credit system supported by the implementation of an effective internal control system, which has met the five elements of the internal control system, namely the control environment, risk interpretation, control activities, information and communication, and monitoring. Conclusion, credit provision procedures and internal control system of credit provision adopted by PD BKK Karanganyar is clear and very good. However, PD BKK Gondangrejo Karanganyar should establish a special mechanism for identifying and tracking inconsistencies with customers or borrowers as well as other outside parties in terms of operational, financial and compliance with prevailing policies.

Keywords: *internal control system, lending*

PENDAHULUAN

Pemerintah mengarahkan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi sebagai usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Di antara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah. Hasibuan (2006) menyatakan bahwa bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah (1) pengumpul dana dari SSU (*surplus spending unit*) atau masyarakat yang kelebihan dana, dan penyalur kredit kepada DSU (*defisit spending unit*) atau masyarakat yang membutuhkan dana; (2) tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat; (3) pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis; (4) penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan *letter of credit* penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini, negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju (Hasibuan, 2006). Bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga bank dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Namun, pengelolaan perkreditan mempunyai berbagai masalah yang cukup rumit seperti timbulnya

kredit macet, yang disebabkan karena tidak mempunya nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap bank tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan yang baik dengan penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahankesalahan dan penyelewengan-penyelewengan.

Dalam memberikan kredit, pihak bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitur yang sering disebut 5C (*Character, Capasity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit amat penting dilakukan, karena pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. PD BKK Gondangrejo Karanganyar.dalam memberikan kredit berkewajiban untuk mengendalikan terjadinya risiko kredit dengan tujuan agar semua aktivitas kredit bank tidak menimbulkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Untuk itu PD BKK Gondangrejo Karanganyar dalam pemberian kredit terus berupaya menerapkan sistem pengendalian internal, dengan menunjukkan sikap *prudential banking*. Hal ini penting diterapkan karena dapat mengendalikan terjadinya risiko, penyimpangan serta pelanggaran dalam pemberian kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit PD BKK Godangrejo Karanganyar?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar?

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian kredit PD BKK Godangrejo Karanganyar.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar.

LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

Definisi efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Mahmudi, 2005: 92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Mahmudi (2005: 92) menjelaskan arti efektivitas merupakan rasio antara *outcome* dengan *output* dinyatakan seperti rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Ukuran efektivitas merupakan suatu

standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut. Di samping itu adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustainabillity*).

2. Kredit

Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 dala Fahmi & Lavianti (2010: 3) definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya. Menurut Hasibuan (2006: 87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi.

Menurut Kasmir (2002: 105) tujuan pemberian kredit yaitu (1) Mencari keuntungan, dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah (2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. (3) Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Menurut Kasmir (2002:105) fungsi kredit secara luas tersebut antara lain (1) Untuk meningkatkan daya guna uang (2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang (3) Untuk meningkatkan daya guna barang (4) Meningkatkan peredaran barang (5) Sebagai alat stabilitas ekonomi (6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha (7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan (8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2010: 119) yaitu (1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya (2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. (3) *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. (4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. (5) *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. (6) *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. (7) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Serta penilaian kredit dengan prinsip 3R yaitu (1) *Returns* yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit; (2) *Repayment* yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan; (3) *Risk Bearing Ability* yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil.

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya

program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan. Kehatihan artinya besar plafond kredit (Legal Lending Limit = Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) dari setiap calon peminjam.

Kebijakan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan. Kebijakan perkreditan menurut Hasibuan (2006: 92) antara lain:

- a. Bankable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana yang bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijakan risiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.
- c. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
- d. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beranekaragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
- e. Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antarbank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

3. Prosedur Pemberian Kredit

a. Permohonan Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan (investigasi) kredit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum permohonan kredit disetujui atau ditolak. Di dalam penyidikan, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan wawancara dengan debitur, setelah itu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada nasabah, baik data intern maupun ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet. Kemudian melakukan pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh, dan penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan penilaian dari segala aspek baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penilaian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang bertugas sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila kondisi organisasi bagian kredit memungkinkan. Namun apabila bank tidak memiliki petugas khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka penyidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan, karena pimpinan bank dianggap sesuai untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Bank perlu mengadakan penelitian mengenai kewajaran dan kebenaran atas data dan informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum bank melakukan analisis selanjutnya yang tingkatnya lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penarikan kesimpulan yang kurang tepat serta untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus ditambahkan secara tertulis.

Jumlah permohonan dalam jenis kredit ditentukan oleh direksi/kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat. Jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah di luar batas wewenang kepala cabang, maka cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi/kantor pusat disertai hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank yang secara teknis tidak memenuhi persyaratan Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah yang disertai alasan penolakannya. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga (asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau cabang). Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. Dalam penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.

e. Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur (nasabah). Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon (nasabah) yang disampaikan secara tertulis. Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan perbedaan jenis jaminan seperti jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang-barang

bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan pribadi serta jaminan bank, barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa tanah, BPKB dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank, dan nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.

f. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang disetujui oleh pihak bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dana atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang telah ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau fotokopinya.

g. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelunasan kredit adalah memperhitungkan semua kewajiban utang nasabah yang harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan yaitu utang pokok, utang bunga, denda-denda jika ada, dan biaya administrasi lainnya.

4. Sistem Pengendalian Internal

Suatu perusahaan menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam proses pencapaian tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing (2003: 373)* mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* juga menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam definisi berikut:

- a. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.

- b. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
- c. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.
- d. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Seperti yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2003: 374) untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu:

- a. **Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**
Menetapkan suasana suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
- b. **Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)**
Merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
- c. **Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen, seperti: proses ketaatan pada ketentuan tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu atau integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengkajian.
- d. **Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**
Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
- e. **Pemantauan (*Monitoring*)**
Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu.

5. Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan* (2006:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.

- d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- e. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank.
- f. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

Sistem pengendalian kredit, antara lain:

- a. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Adapun jenis-jenis pengendalian kredit:

- a. *Preventive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara:
 - 1) Penetapan plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit.
 - 2) Pemantauan debitur.
 - 3) Pembinaan debitur.
- b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di PD BKK Gondangrejo Karanganyar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah data primer dan data sekunder. Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini hasil jawaban kuesioner dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jml Jawaban YA}}{\text{Jml Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Penulis menyediakan jawaban secara “*close ended questioner*” atau kuesioner secara tertutup, yaitu responden hanya memberi tiga alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis yaitu “Ya”, “Tidak” atau “Tidak Relevan”. Sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut.

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion (1990: 302) yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. 0,00 - 0,25 = *No association or low association (weak association)*
- b. 0,26 – 0,50 = *Moderately low association (moderation association)*
- c. 0,51 – 0,75 = *Moderately high association (moderation strong association)*
- d. 0,76 – 1,00 = *High association (strong association up to perfect assosiation)*

Klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. 0% - 25% = penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
- b. 26% - 50% = Penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
- c. 51% - 75% = Penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
- d. 76% - 100% = Penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pemberian kredit pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar, dapat dijelaskan berdasarkan prosedur pemberian kredit berikut ini:

1. Prosedur permohonan kredit.

Dalam prosedur ini, pemohon kredit atau calon debitur harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses. Persyaratan yang dimaksud adalah calon debitur memiliki:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keluarga
- c. Akta Nikah
- d. Kartu NPWP
- e. Rekening (terisi saldo minimal tiga bulan terakhir)
- f. Slip gaji (bagi karyawan)
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi wiraswasta).

Ketika segala persyaratan tersebut telah dimiliki, calon debitur kemudian diminta untuk mengisi sendiri daftar isian permohonan kredit di tempat lalu mengumpulkannya ke petugas dengan melampirkan salinan-salinan persyaratan tersebut. Setelah itu, petugas akan mencatat surat permohonan kredit calon debitur tersebut ke dalam register.

2. Prosedur penyelidikan dan analisis kredit

Prosedur ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap penyelidikan dan tahap analisis kredit yang dilakukan oleh petugas yang berbeda. Yang termasuk tahap penyelidikan adalah:

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur
- b. Pengumpulan data intern dan ekstern
- c. Pemeriksaan dan penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon kredit.

Kemudian analisis kredit dilakukan antara lain dengan:

- a. Melakukan analisis laporan keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui segala kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan atau pejabat yang berwenang dari permohonan kredit calon debitur.

3. Prosedur persetujuan permohonan kredit

Apabila semua prosedur tidak disetujui, termasuk apabila secara teknis pemohon kredit tidak memenuhi syarat maka petugas menyampaikan keputusan penolakan secara tertulis serta mengembalikan semua berkas yang telah disetorkan oleh calon debitur. Tetapi apabila semua prosedur disetujui maka ditindak lanjuti. Adapun prosedur lanjutan yang dilakukan adalah:

- a. Petugas menegaskan syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh debitur.

- b. Petugas memeriksa keabsahan dokumen jaminan yang biasanya ditentukan berdasarkan penjadwalan wawancara antara pihak debitur dengan pihak petugas (analisis kredit) mengenai kredit perjanjian/surat keputusan dan penandatanganan warkat-warkat yang berisi ; jumlah pinjaman kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit yang diajukan, pola angsuran, besarnya kewajiban per bulan (pokok dan bunga), dan barang-barang agunan.

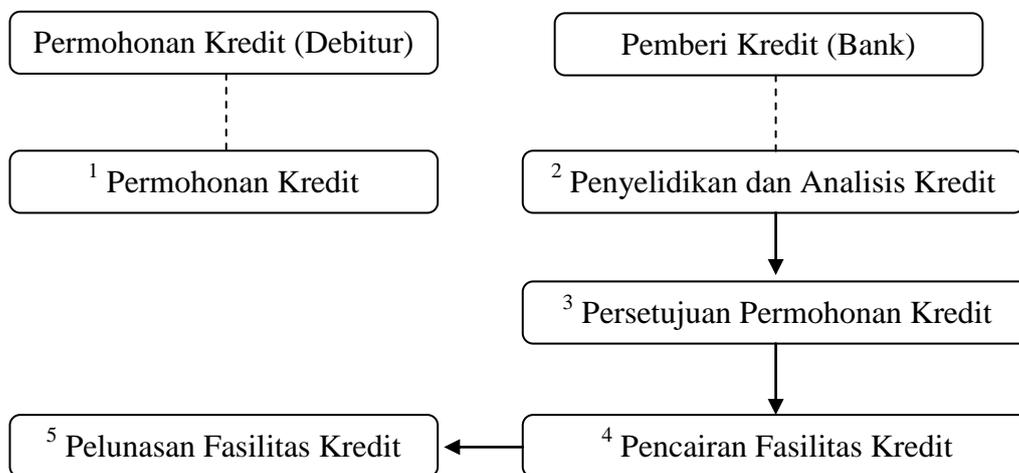
4. Prosedur pencairan fasilitas kredit

Cara pencairan kredit yang telah disetujui diawali dengan *customer service* menghubungi nasabah/debitur untuk datang kembali ke bank. *Customer service* akan menyiapkan Surat Pengakuan Utang (SPH) untuk menandatangani akad kredit oleh nasabah/debitur dan menyiapkan kuitansi realisasi kredit untuk pencairan pinjaman kredit. Pencairan dapat dilakukan pada hari itu juga, pencairannya langsung mendatangi bagian teller (kasir). Bukti pencairan kredit akan dibuatkan copy atau salinannya oleh teller.

5. Prosedur pelunasan fasilitas kredit

Pelunasan kredit yaitu dipenuhinya semua utang debitur terhadap bank yang mengakibatkan hapusnya perikatan perjanjian kredit. Semua kewajiban debitur harus diselesaikan sampai tanggal pelunasan yang meliputi utang pokok dan utang bunga. Bank akan mengatakan kepada debitur bahwa kredit telah lunas, apakah ingin dipakai lagi atau tidak. Bila debiturnya memakai lagi setelah dilakukan evaluasi oleh analis kredit dan pimpinan yang berwenang maka bank akan memperpanjang kreditnya, namun jika tidak diperpanjang lagi maka bank harus mengembalikan semua dokumen milik debitur dalam keadaan bersih dan begitu pula bank akan menerima tanda terima serta memberi tanda kredit lunas.

Secara umum, prosedur pemberian kredit pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Pemberian Kredit di PD BKK Gondangrejo Karanganyar

Sumber: PD BKK Gondangrejo Karanganyar, 2016

Selain adanya prosedur pemberian kredit yang jelas, PD BKK Gondangrejo Karanganyar juga menyiapkan petugas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas terlaksananya prosedur pemberian kredit tersebut, termasuk melakukan pengawasan pada:

- a. jumlah plafond kredit;
- b. jaminan yang diberikan nasabah/debitur;
- c. setoran jaminan nasabah/debitur;

- d. laporan kegiatan usaha nasabah/debitur;
 - e. aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisa kredit;
 - f. administrasi sehingga dapat diketahui penyimpangan yang terjadi; dan
 - g. administrasi nasaba/debitur secara individu maupun secara keseluruhan.
6. Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PD BKK Gondangrejo Karanganyar
- Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.
7. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- Lingkungan pengendalian menekankan pada semua faktor kunci yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika, komitmen atas kompetensi, filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan, struktur organisasi, keterlibatan dewan pengawas, serta kebijakan sumber daya manusia dan aplikasinya.
- Secara umum, lingkungan pengendalian PD BKK Gondangrejo Karanganyar dalam kaitannya dengan pemberian kredit digambarkan sebagai berikut:
- a. Integritas dan nilai etika

PD BKK Gondangrejo Karanganyar sangat menjunjung tinggi integritas. PD BKK Gondangrejo Karanganyar memiliki kebijakan dan prosedur pemberian kredit dan hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten. Selain itu, PD BKK Gondangrejo Karanganyar juga memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku. Kode etik tersebut komprehensif dan mencakup hal-hal seperti pertentangan kepentingan, hal-hal illegal atau tidak benar. Dengan demikian, pihak manajemen akan melakukan tindakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai atau karyawan yang berbuat tidak jujur.
 - b. Komitmen atas kompetensi

Kompetensi menjadi pertimbangan manajemen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar. Kompetensi merupakan suatu pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan. Adanya uraian tugas (job description) yang menguraikan tugas tertentu menjadi salah bukti komitmen manajemen kompetensi para pegawai atau karyawannya, seperti PD BKK Gondangrejo Karanganyar memiliki *flowchart* prosedur pemberian kredit yang dipahami oleh setiap karyawan yang berada di sana.
 - c. Filosofi dan gaya manajemen

Filosofi dan gaya manajemen akan berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominasi oleh satu atau beberapa orang individu. Pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar, manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan kreatif, termasuk dalam pemberian kredit kepada nasabah atau debitur.
 - d. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi formal berkaitan dengan lingkungan pengendalian. PD BKK Gondangrejo Karanganyar memiliki struktur organisasi yang jelas yang menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi semua direksi maupun karyawan. Misalnya dalam hal pemberian kredit, hanya pejabat yang berwenang yang berhak untuk memberikan keputusan kredit.

- e. Keterlibatan Dewan pengawas
Dewan Pengawas atau Komite Audit merupakan dewan yang bertugas dan berfungsi membantu Dewan Pembina atau Dewan Komisaris untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian internal serta fungsi-fungsi audit. Pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar, Dewan Pengawas mempunyai suatu deskripsi tugas dan tanggung jawab secara tertulis sehingga dapat diketahui seberapa jauh keterlibatan Dewan Pengawas di dalam perusahaan ini.
- f. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang sangat penting. Memiliki SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Olehnya itu, PD BKK Gondangrejo Karanganyar memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam rangka mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya. Selain itu, adanya deskripsi tugas karyawan dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab menjadi bukti usaha PD BKK Gondangrejo Karanganyar untuk mencapainya.

8. Penafsiran Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik risiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun risiko yang berasal dari internal perusahaan. Risiko ini terkait dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan. Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan harus melakukan penafsiran risiko secara memadai. PD BKK Gondangrejo Karanganyar telah melakukan penaksiran risiko atas kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul karena:

- a. Penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit
- b. Perubahan dalam sistem informasi pemberian kredit
- c. Peningkatan aktivitas pemberian kredit
- d. Sosialisasi penggunaan teknologi informasi baru dalam aktivitas pemberian kredit
- e. Perubahan pada penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam pemberian kredit.

9. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh PD BKK Gondangrejo Karanganyar dalam kaitannya dengan pemberian kredit adalah:

- a. Pemberian kredit hanya diberikan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bukti pemberian kredit masuk dibuat menjadi beberapa rangkap dan didistribusikan kepada bagian yang berbeda guna kepentingan pengawasan internal
- c. Saldo kredit yang ada dijamin perlindungannya dari kemungkinan besar adanya penipuan.
- d. Pencatatan dalam jurnal pemberian kredit didasarkan pada bukti kredit masuk yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen lengkap.
- e. Fungsi pemberian kredit dilengkapi oleh alat-alat yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dilaksanakan.
- f. Kredit yang sedang dalam proses dan yang sedang berjalan masing-masing mendapatkan perlindungan asuransi.
- g. Fungsi yang tidak terlihat dalam penyimpanan kredit, pemberian kredit dan pencatatan kredit menggunakan rekening Koran bank untuk mengecek ketelitian dan keakuratan catatan pemberian kredit.

- h. Dokumen pemberian kredit diberikan nomor urut yang tercetak.
- i. Untuk menguji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data kas yang diterima dilakukan dengan pengecekan independen.

10. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi diperlukan pada tiap level di dalam organisasi. Informasi dan komunikasi akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi. Pengendalian internal pemberian kredit PD BKK Gondangrejo Karanganyar dalam hal informasi dan komunikasi meliputi:

- a. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan yang menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit yang sah.
- b. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat atas transaksi-transaksi yang cukup rinci untuk membenarkan pengklasifikasian dari transaksi dalam laporan keuangan secara wajar.
- c. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneterinya di dalam laporan keuangan yang wajar.
- d. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk transaksi pemberian kredit yang berhubungan dengan laporan keuangan secara wajar dalam perusahaan.
- e. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam hal posting dan pengikhtisaran yang benar atas transaksi-transaksi pemberian kredit.
- f. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam pengotorisasian transaksi-transaksi pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang.

11. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses penilaian struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian internal, khususnya dalam hal pemberian kredit pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar dilaksanakan oleh pihak manajemen yaitu bagian analisis kredit. Analisis kredit melakukan pemantauan dalam rangka menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit. Selain itu, PD BKK Gondangrejo Karanganyar memiliki Komite Kebijakan Perkreditan termasuk di PD BKK Gondangrejo Karanganyar yang bertugas untuk:

- a. Memutuskan seluruh kebijakan perkreditan yang berlaku,
- b. Melakukan kajian berkala atas seluruh kebijakan perkreditan dan melakukan revisi apabila diperlukan,
- c. Menetapkan target market kredit berikut sektor-sektor yang harus dihindari.
- d. Menetapkan metode dan batasan pengukuran risiko kredit (*credit risk methodology & limit*),
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan dan kualitas portfolio kredit secara keseluruhan.

Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang sangat efektif pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar menjadi sebuah bukti nyata atas usaha PD BKK Gondangrejo Karanganyar untuk mencapai visi dan misinya. Masyarakat ataupun para stakeholder memberikan kepercayaan atas kemampuan PD BKK Gondangrejo Karanganyar di dalam menyediakan kredit bagi mereka. Penyediaan dana kredit yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya pada tahun 2012 yaitu kredit konsumen (16,16%), kredit modal kerja (32,55%), kredit investasi (20,36%), dan bank garansi (30,93%).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara umum, sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD BKK Gondangrejo Karanganyar terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur penyelidikan dan analisis kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit. Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD BKK Gondangrejo Karanganyar tersebut telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang sangat efektif, dan telah memenuhi kelima elemen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penafsiran risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).

Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang sangat efektif pada PD BKK Gondangrejo Karanganyar menjadi sebuah bukti nyata atas usaha PD BKK Gondangrejo Karanganyar untuk mencapai visi dan misinya, serta menjadi alasan bagi calon debitur memilih PD BKK Gondangrejo Karanganyar untuk memfasilitasi kebutuhan mereka di bidang perkreditan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini di antaranya adalah dalam hal penafsiran risiko (*risk assessment*), sebaiknya PD BKK Gondangrejo Karanganyar tidak hanya melakukan penafsiran risiko dalam hal kemungkinan salah saji laporan keuangan, tetapi sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku karena hal ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit secara keseluruhan. Sebaiknya lebih berinovasi dan membuat program-program yang dibutuhkan oleh nasabah, debitur ataupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, Johnson, Kell. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.
- Champion, Dean J. 1981. *Basic Statistic For Social Research*. Edisi Kedua. Cincinnati, Ohio, South-Western Publishing Co.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, I. dan Lavianti, Y. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sari, Linda Mega. Penerapan Implementasi Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Universitas Gunadarma.
- Suyatno, Thomas dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfayani, Andi. 2011. Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Online:

- BNI. www.bni.com. (online) diakses 10 Oktober 2012.
- [Http://eprints.undip.ac.id/26647/1/JURNALRuzanna_Amanina_C2C607134_.pdf](http://eprints.undip.ac.id/26647/1/JURNALRuzanna_Amanina_C2C607134_.pdf)
- Unikom. Efektivitas. (online) http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbp_tunikompp-gdl-uhamadalf-24330-2-babii.pdf. diakses 6 Oktober 2012.